

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DASAR PERUBAHAN MODAL DASAR PERSEROAN TERBATAS MELALUI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2016 GUNA MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KE TIGA YANG BERITIKAD BAIK

Oleh:

Ratumela Marten Petrus Sabono¹ dan Veri Antoni, S.H., M.Hum.²

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui menganalisis mengenai dasar perubahan modal dasar perseroan terbatas berdasarkan peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2016 dalam menjamin perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik, dan mengetahui menganalisis pertimbangan Ikatan Notaris Indonesia dalam menanggapi perubahan modal dasar perseroan terbatas.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder kemudian dilanjutkan dengan melakukan penelitian dengan cara memperoleh data secara langsung dari masyarakat berupa data primer. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan keadaan kemudian menganalisis variabel-variabel yang sesuai dengan masalah.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa dasar perubahan modal dasar perseroan terbatas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun belum memberikan perlindungan hukum kepada pihak ketiga yang beritikad baik, karena modal dasar yang digunakan sebagai jaminan perlindungan hukum bagi pihak ketiga dimungkinkan ditentukan dengan modal yang kecil. Kemudian Ikatan Notaris Indonesia sebagai organisasi profesi notaris dalam menanggapi perubahan modal tersebut berpendapat bahwa para notaris dalam menghadapi pendiri dengan modal dasar kecil agar memberikan penyuluhan hukum terkait akibat-akibat hukum yang akan dihadapi oleh pendiri kaitannya dengan jaminan terhadap pihak ketiga.

Kata Kunci: Modal Dasar, Perlindungan Hukum, Pihak Ketiga, Itikad Baik

¹ Jalan Jetisharjo JT 2, Nomor 419, Kota Yogyakarta.

² Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

***A JUDICIAL REVIEW OF THE PRINCIPLE OF CHANGES IN AUTHORIZED
CAPITAL OF LIMITED LIABILITY COMPANY ACCORDING TO
GOVERNMENT REGULATION NO 29 OF 2016
IN GUARANTEE OF LEGAL PROTECTION OF THIRD PARTIES
WITH GOOD FAITH***

By

Ratumela Marten Petrus Sabono³ dan Veri Antoni, S.H., M.Hum.⁴

Abstract

This research aims to know and analyze the principle of changes in authorized capital of limited liability company according to government regulation no 29 of 2016 in guarantee of legal protection of third parties with good faith, and to know and analyze the consideration of the Indonesia notary association in responses of the principle of changes in authorized capital of limited liability company.

The method used in this research is empirical normative research, that is research conducted by examining secondary data and Afterwards followed by doing research by obtaining data directly from the community in the form of primary data. this research is analytical descriptive, that is this research describes the condition then analyze the variables according to the problem.

Based on the result of the research, that the principle of changes in authorized capital of limited liability company according to government regulation no 29 of 2016 has not give legal protection to third party with good faith, because the authorized capital used as guarantee of legal protection for third party is possible determined with small capital. after which the Notary Association of Indonesia as a notary profession organization in response to the change of capital argues that the notary in the face of the founder with a small basic capital in order to provide legal counseling related legal consequences to be faced by the parties relating to guarantees against third parties.

Keywords: Authorized Capital, Legal Protection, Third Party, Good Faith

³ Jalan Jetisharjo JT 2, Nomor 419, Kota Yogyakarta.

⁴ Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.